



B7 ✓

# Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial KAJIAN

KUALITAS PELAYANAN URUSAN PENSIIUN DI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

*Agus Triharyadi dan Retnowati*

MENCARI FORMAT PEMILIHAN UMUM YANG IDEAL DI INDONESIA

*Endang Sulastrri*

KEPENTINGAN EKONOMI-POLITIK DAN IDENTITAS POLITIK:  
STUDI KASUS KLAIM KESULTANAN SULU ATAS WILAYAH SABAH

*Debbie Affianty*

STRATEGI KOMUNIKASI DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
MELALUI MIKRO KREDIT HOME INDUSTRI

*Sa'diyah El Adawiyah*

HIZBUT TAHRIR INDONESIA DAN EKSISTENSI FUNDAMENTALISME

*Lusi Andriyani*

FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Library of  
ANDRIYANI, SIP

AN	Volume 24	Nomor 2	Hlm 1-82	Jakarta Juli 2013	ISSN : 0852-6060
----	-----------	---------	----------	----------------------	---------------------

**HIZBUT TAHRIR INDONESIA DAN EKSISTENSI FUNDAMENTALISME**

Oleh: Lusi Andriyani

**Abstract**

*This paper start from the assumption of Ahmad Safii Maarif stating that the HTI as the patterned transnational organizations, to establish the Khilafah will merge with the building of nation-states. The emergence of religious movements in the context of reform, globalization has repercussions on the strengthening of the identity and life of the nation in democracy. In the view of some experts emergence of religious-based movement is a form of fairness in the reform era that demands the freedom of space prevail. Similarly, the growth of the movement of other fundamentalist groups. On the other hand fundamentalist movements performed by HTI and brought the Islamic Caliphate and tend exclusive has undermined the view of Kuntowijoyo about periodization of Islam. Thus, when referring to the pattern of HTI in strengthening its presence as one of the organizations that move outside the system through the criticisms made, that HTI offers a new concept in the state and nation through "Islamic caliphate" through a pattern of transnational political party Hizb. identity politics perspective presumably can be used to describe the process of strengthening identity as a form of thought eksistensi plantation in Indonesia's political dynamics in democracy. Hizb ut-Tahrir in the concept of a political party whose ideology of Islam. HTI as political party, it is a political activity, and Islam is its ideology. HTI as fundamentalist movements establish identity through continuous propaganda strategy. HTI as an ideological Islamic political party is a form of a new institution that was built to provide an alternative ideology as an effort to provide a solution to the existing problems in the community through the Khilafah Islamiyah. With exclusive movement patterns concept of pluralism juxtaposed with the concept of "no compromise" would be able to destroy the building of democracy and national and state building.*

*Keywords: Fundamentalism, HTI, Identity Politics, Reform*

## A. PENDAHULUAN

Tulisan ini saya susun berangkat dari asumsi dari Ahmad Safii Maarif yang menyatakan bahwa angan-angan HTI sebagai organisasi yang bercorak transnasional, dengan penegakan khilafah akan meleburkan bangunan negara-negara bangsa<sup>1</sup>. HTI telah menutup mata pada sejarah kekhilafahan yang menurut Ahmad Syafii Maarif telah membunuh prinsip-prinsip egalitarian. Dimana prinsip egalitarian diakui dalam demokrasi, dan secara tegas dinyatakan dalam al-qur'an surat al-hujurat ayat 13. Pandangan ahistoris HTI dalam melihat sejarah perjalanan kekhilafahan akan dapat menciptakan "imperialism agama" pada skala global yang menurut Shiddiq al-Jawi akan menjadi kenyataan pada tahun 2020<sup>2</sup>. Setidaknya ada dua hal yang menarik dari hipotesis Ahmad Syafii Maarif tersebut. *Pertama*, adanya gerakan yang ingin melenyapkan prinsip egalitarian yang dianut dalam demokrasi. *Kedua*, masa depan kehidupan berbangsa dan bernegara bagi Indonesia dengan semakin menguatnya identitas HTI sebagai gerakan fundamentalisme. Kedua hal tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi saya untuk membahas fenomena menguatnya identitas yang berbasis agama di Indonesia dan masa depan demokrasi di Indonesia. Bagi fundamentalisme, agama adalah ekspresi tatanan Tuhan, sebagaimana secara skematis dipertentangkan dengan tatanan sekuler, dalam hal ini kekuasaan Tuhan menggantikan kekuasaan manusia<sup>3</sup>.

Munculnya gerakan-gerakan keagamaan dalam konteks reformasi, keterbukaan dan globalisasi memberikan konsekuensi tersendiri bagi penguatan identitas serta kehidupan berbangsa dan bernegara dalam koridor demokrasi. Keberbedaan yang muncul tidak lagi dipandang melalui kaca mata pluralism yang mengakui keberbedaan dengan spirit toleransi yang tinggi, namun hal ini justru membangun pandangan baru tentang "keakuan" dan "kebenaran terhadap nilai" yang bersifat mutlak dan cenderung memaksakan kepada pandangan orang lain yang berbeda. Upaya yang dilakukan HTI untuk menunjukkan eksistensinya adalah melalui aksi turun ke jalan. Diantaranya aksi di depan Kantor Pemprov DKI Jakarta hari Jum'at, tanggal 22 Pebruari 2013 dengan mengerahkan 1500 massa untuk menyerukan agar Gubernur DKI Jakarta, Jokowi tidak mengeluarkan Izin Membangun Bangunan (IMB) pada pihak Kedubes Amerika Serikat yang mereka nilai justru langkah tersebut akan memperkokoh penjajahan di Indonesia. Aksi lainnya berakaitan dengan solidaritas Palestina, Jihad ke Palestina serta konferensi internasional yang dikemas dalam konferensi intelektual internasional pada akhir Desember 2013 di JCC dengan *tema 'The end of capitalize and the prospects of Islamic civilization under Khilafah'* atau 'Akhir kapitalisme dan masa depan peradaban Islam dalam naungan Khilafah'<sup>4</sup>.

<sup>1</sup>Ahmad Syafi'i Ma'arif, Politik identitas dan masadepan pluralism kita, Jakarta, yayasan Demokrasi, 2012, hal.25

<sup>2</sup>Ibid,hal 25

<sup>3</sup>Bassam Tibi, Ancaman fundamentalisme, Yogja, Tiara wacana, 2000, hal. 35.

<sup>4</sup>[www.republika.co.id](http://www.republika.co.id), HTI Gelar Koneferensi Nasional Peradaban Islam, Republika online, 13 Desember 2013, diakses pada tanggal 12 Oktober 2014

Mengacu pada pandangan Buya Syafii Maarif dan dinamika aksi HTI sebagaimana penjelasan diatas, kiranya menarik untuk di lihat bagaimana eksistensi HTI dibangun dan dikembangkan termasuk didalamnya terkait dengan sosialisasi ide-ide HTI dengan karakteristik pemikirannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan koridor demokrasi di Indonesia.

#### A. PERMASALAHAN

Berakhirnya orde baru dengan orde reformasi pada tahun 1998 telah memberikan ruang yang luas bagi munculnya gerakan-gerakan dan organisasi keagamaan di Indonesia. Salah satu gerakan keagamaan yang tumbuh dan berkembang di Indonesia adalah HTI (Hizbut Tahrir Indonesia). Walaupun dengan sematan kata Indonesia di belakang organisasi tersebut, namun organisasi ini mempunyai angan-angan sebagai organisasi transnasional yang justru akan menghilangkan sekat-sekat bangsa dan negara. Dalam pandangan beberapa ahli munculnya gerakan yang berbasis keagamaan merupakan bentuk kewajaran dalam era reformasi yang menuntut ruang kebebasan itu berlaku. Begitu pula dengan tumbuhnya gerakan kelompok fundamentalisme lainnya. Namun disisi lain gerakan fundamentalisme yang dilakukan oleh HTI dengan mengusung khilafah islamiah dan cenderung eksklusif telah meruntuhkan pandangan dari Kuntowijoyo tentang periodisasi Islam. Dalam pandangannya, Kuntowijoyo membagi periodisasi sejarah Islam di Indonesia dalam tiga periode, yakni periode mitos, periode ideologi dan periode ilmu, dimana pada saat umat bergerak dari posisi sebagai kawulo, wong cilik dan akhirnya warga negara<sup>5</sup>. Namun yang terjadi belakangan ini justru ada upaya-upaya penguatan identitas dan peran yang dilakukan oleh gerakan dan organisasi Islam seperti HTI untuk membangun konsep baru tentang berbangsa dan bernegara yang akan menghapus periodisasi Islam sebagai ilmu yang diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan berbangsa bernegara. Dengan kata lain Islam kemudian harus berperan untuk mengendalikan sistem yang membutuhkan kecermatan dalam mengawasi sistem serta kemampuan untuk terlibat didalamnya<sup>6</sup>.

Dalam realitasnya, peran HTI selama ini justru membangun pola bahwa gerakan yang berada diluar sistem dan ingin membangun sistem baru dengan meruntuhkan bangunan sistem yang ada. Sehingga apa yang dilakukan HTI selama ini melalu kritik yang disampaikan merupakan bentuk pengawasan untuk menguatkan pandangan mereka tentang pentingnya bangunan baru dengan konsep khilafah Islamiyah. Disisi lain HTI juga mempunyai obsesi melakukan objektivikasi terhadap Islam agar menjadi ideologi alternatif dengan pola membangun jaringan yang kuat ditingkat anggota yang sekaligus sebagai basis gerakan sosialnya<sup>7</sup>. HTI justru tidak hadir dalam

<sup>5</sup> Kuntowijoyo, Paradigma islam interpretasi untuk aksi, Jakarta, Mizan, 1996, Hal.25.

<sup>6</sup> Ibid, hal.27

<sup>7</sup> Syamsul Arifin, Ideologi dan praksis gerakan social, Malang, UMM Press, 2005, hal. 3

sistem namun organisasi ini memilih bergerak diluar secara sistematis dengan menyusun kelompok-kelompok pengajian. Bahkan dalam perkembangan kekinian, Hizbut Tahrir akhirnya mendeklarasikan dirinya sebagai partai politik. konsep partai politik yang ditawarkan adalah "partai politik yang berdiri sendiri, tidak mewakili dan tidak diwakili oleh siapapun"<sup>8</sup>.

Dengan demikian, apabila mengacu pada pola HTI dalam menguatkan eksistensinya sebagai salah satu ormas yang bergerak diluar sistem melalui kritik yang dilakukan, terlihat bahwa HTI menawarkan konsep baru dalam berbangsa dan bernegara melalui "khilafah Islamiyah" dengan pola transnasional melalui partai politik Hizbut Tahrir itu sendiri. Dengan menggunakan prespektif politik identitas kiranya dapat digunakan untuk menggambarkan proses penguatan identitas sebagai bentuk eksistensi pemikiran HTI dalam dinamika politik di Indonesia yang berjalan bersebrangan dengan perkembangan demokrasi.

## B. KERANGKA BERFIKIR

Dalam upaya memahami peran dan pemikiran yang dikembangkan oleh HTI, terdapat beberapa pandangan yang dapat digunakan sebagai alat untuk menjelaskan proses penguatan identitas HTI. Pendapat pertama adalah pandangan Manuel Castells yang menjelaskan bahwa identitas mengacu pada aktor sosial, sebagai suatu proses konstruksi makna yang berdasarkan pada atribut budaya, atau serangkaian hubungan dari atribut budaya yang memberikan pemaknaan yang lebih dari sumber makna yang lain. Dimana pluralitas merupakan sumber yang bertolak belakang dengan representasi setiap individu ataupun tindakan sosial. Ini terjadi karena identitas dibedakan dari tradisi, peran sosial dan seperangkat peran lainnya, yang disebut dengan struktur norma dari sebuah institusi dan organisasi masyarakat. Identitas lebih luas dalam mempengaruhi perilaku seseorang tergantung pada negosiasi dari peran individu, institusi dan organisasi. Identitas bersumber dari pemaknaan dari dirinya sendiri dan dirinyalah yang mengkonstruksi melalui proses yang ada pada setiap individu. Dalam arti yang lebih luas, konstruksi sebuah identitas selalu mengambil tempat dalam konteks pasar dan kekuasaan. Menurut pandangan Manuel Castell ada tiga bentuk terbangunya identitas<sup>9</sup>:

1. *Legitimizing identity*; mengacu pada institusi yang dominan untuk menetapkan dan merasionalisasikan dominasi mereka berhadapan dengan aktor sosial. Hal ini berkaitan dengan kewenangan dan dominasi serta nasionalism.
2. *Resistance identity*; secara umum didominasi oleh aktor yang mempunyai posisi untuk membangun stigma melalui dominasinya, sehingga dapat membangun resistensi dari

<sup>8</sup> [www.hizbut-tahrir.or.id](http://www.hizbut-tahrir.or.id), Utsman Bakhasy, Hizbut Tahrir adalah partai politik yang berdiri sendiri tidak mewakili dan tidak diwakili oleh siapapun

<sup>9</sup> Manuel Castells, Castells, *The Power of Identity: Second Edition*, Balckweell Publishing, Australia, 2002. Hal.6-8.

keberlangsungan prinsip-prinsip dasar yang membedakan, atau yang bertolak belakang dengan institusi yang ada dalam masyarakat.

3. *Project identity*; ketika aktor sosial berdasar pada budaya membangun sebuah identitas baru dan berupaya untuk mendefinisikan kembali posisi mereka dalam masyarakat dengan identitas barunya. Mereka mencoba untuk mentransformasikan struktur sosial. Sebagai contoh, gerakan sosial yang dilakukan oleh kaum feminis untuk memperjuangkan hak keperempuanan-nya yang dipandang telah mengalami resistensi karena adanya pola patriarki yang ada dalam keluarga dan masyarakat.

Berdasar uraian diatas, maka perlu adanya langkah kongret melalui penegakan hukum dalam prespektif HAM dan melakukan dialog secara jujur dan terbuka. Walaupun dalam kenyataannya kaum fundamentalis akan sangat sulit untuk diajak berdialog secara terbuka dan jujur. Melalui filosofi fundamentalisme, Ahmad Syafii Maarif menjelaskan bahwa apapun agama dan ideologi politik mereka, filosofi "semau gue" akan menjadi penghalang besar dalam melakukan dialog atas dasar persamaan posisi walaupun kondisi tersebut akan dapat berubah seiring dengan adanya rangsangan dari luar berupa perubahan suasana pergaulan, bacaan dan kondisi ekonomi, dapat mengubah seorang fundamentalis menjadi pluralis<sup>10</sup>.

Bagi terbangunnya *nation state*, menurut Ahmad Syafii Maarif, munculnya gagasan baru yang masih dalam angan-angan betatapun radikalnya tidak akan menjadi masalah, yang menjadi permasalahan menurut Ahmad Syafii Maarif adalah jika gagasan tersebut diaktualisasikan dibawah jubah politik identitas yang dapat menghancurkan bangunan masyarakat dan kemanusiaan<sup>11</sup>. Dalam konteks nasionalisme, upaya untuk membangun nasionalisme kebangsaan seharusnya tidak didasarkan pada kesadaran tentang kesatuan melainkan harus didasarkan pada kesadaran akan perbedaan dalam semangat persatuan sehingga perbedaan akan memperoleh tempat yang terhormat. Proses tersebut akan dapat diwujudkan apabila proses politik terfasilitasi dengan baik dan berbanding lurus dengan proses sosiologis<sup>12</sup>.

Untuk mendukung pandangan yang di sampaikan Ahmad Syafii Maarif, dalam konteks peran agama, maka pandangan Bryan A. S.Rasmussen digunakan untuk menjelaskannya. Menurut Bryan agama sebagai ideologi memberikan penekanan penting terhadap, fungsinya bagi setiap individu yang dapat dimanifestasikan dalam berbagai hal seperti upaya untuk mempengaruhi institusi negara dll. Dalam masyarakat sipil yang sudah mulai menguat, agama dapat berperan untuk pertukaran ide dan gagasan serta mampu mempromosikan masyarakat sipil dan modal

<sup>10</sup>Ibid, Ahmad syafii Maarif, hal. 122.

<sup>11</sup> Ibid, Ahmad Syafii Maarif, hal. 125.

<sup>12</sup> Ibid, Ahmad Syaafii Maarif, hal. 126.

sosial<sup>13</sup>. Dalam hal ini ada beberapa peran agama yang memiliki arti penting : *pertama*, agama dengan pesan yang disampaikan dalam konteks religius mampu mempunyai dampak kuat pada individu untuk mengubah perilakunya. *Kedua*, Agama dapat mempromosikan gagasan baik dengan orang lain serta mampu memiliki struktur formal untuk pertemuan regular dan pertukaran ide. *Ketiga*, kombinasi keduanya sehingga dalam posisi yang unik agama mampu mempengaruhi public.

Ketiga pandangan yang berkaitan dengan politki identitas dan pengaruhnya sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas, akan menjadi landasan untuk menganalisis bagaimana eksistensi HTI dibangun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam konteks demokrasi di Indonesia. Dengan demikian diharapkan dapat diperoleh penjelasan yang komprehensif mengenai fundamentalisme dalam dinamika berbangsa dan bernegara dalam konteks demokrasi dengan melihat sisi penguatan identitas yang terjadi di organisasi Islam fundamentalis (HTI).

### C. BIOGRAFI DAN KONTEKS KEHIDUPAN POLITIK

Untuk dapat memahami eksistensi Hzbut Tahrir Indonesia, maka dalam konteks ini perlu di jelaskan terlebih dahulu bagaimana ide tersebut dikonstruksikan. Seperti yang telah disampaikan oleh Manuel Castell yang melihat proses sosial sebagai bagian dari konstruksi pemikiran yang menekankan pada institusi yang dominan, aktor yang dominan serta actor social yang berbasis budaya. Untuk itu dalam melihat perkembangan ide tersebut, maka factor internal merupakan hal; yang paling penting didalam mendukung pertumbuhan dan pergerakan dari organisasi. Sehingga peran pemimpin yang memunculkan gagasan tersebut menjadi hal yang penting untuk dijelaskan. Pemimpin merupakan bagian dari actor yang mengkonstruksi pemikiran pengikutnya. Begitu juga dengan perkembangan HTI di Indonesia, maka Al-Nabhani merupakan sosok yang tidak bias dilepaskan dalam konteks penguatan identitas HT.

Hizbut Tahrir didirikan pada tahun 1953 oleh Taqi al-Din al-Nabhani atau Taqiyuddin An-Nabhani di Jerussalem. An-Nabhani dibesarkan dalam lingkungan tradisi agama yang kuat. Ayahnya merupakan pengajar ilmu syari'ah di kementerian pendidikan Palestina. Sedangkan ibunya juga menguasai beberapa cabang ilmu syari'ah yang diperoleh dari ayahnya Yusuf ibn Ismail ibn Yusuf al-Nabhani yang dikenal sebagai seorang hakim, sastrawan serta ulama terkemuka pada zaman Daulah uthmaniyah yang mendapat julukan sebagai bapak kebaikan karena memiliki budi pekerti yang baik dan sufi. Lingkungan keagamaan yang kental ini memberi pengaruh yang sangat besar pada pembentukan pribadi dan pandangan hidup al-Nabhani, sehingga sejak usia 13 tahun telah mampu menghafal al-qur'an.

<sup>13</sup> Kacung Marijan, Ilmu Politik Dalam Paradigma Abad 21, Jakarta, Prenada Media Group, 2013.

Tidak hanya lingkungan keluarga yang mempunyai pengaruh penting, lingkungan formal sekolah juga berperan dalam membentuk karakter al-Nabhani. Al-Nabhani menempuh pendidikan di sekolah dasar negeri di Ijmi, yang kemudian melanjutkan pada jenjang menengah di Akka. Atas dorongan kakeknya al-Nabhani melanjutkan pendidikan di al-Azhar Kairo dan berhasil menyelesaikan dengan predikat sangat memuaskan. Selanjutnya beliau menempuh pendidikan di Kulliyah Dar al-Ulum yang merupakan cabang dari al-Azhar. Selama menempuh pendidikan di al-Azhar, al-Nabhani sering menghadiri halaqah-halaqah ilmiah ulama al-Azhar seperti Muhammad al-Khaidir Husein. Dalam forum al-Nabhani dikenal sebagai sosok pemikir yang kokoh, pemikiran yang mendalam serta mempunyai kemampuan yang tinggi untuk meyakinkan peserta halaqah.

Setelah menamatkan pendidikannya di Dar al-Ulum pada tahun 1932 dan pada tahun yang sama beliau juga menamatkan pendidikannya di Al-Azhar Sharif yang menggunakan sistem lama. Setelah menyelesaikan pendidikannya, al-Nabhani kembali ke Palestina dan bekerja di kementerian pendidikan Palestina sebagai seorang guru di sebuah sekolah menengah atas negeri di Haifa. Selain itu beliau juga mengajar di sekolah lain di beberapa kota sejak tahun 1932-1938. Yang akhirnya pada tahun 1938 beliau mengajukan permohonan untuk bekerja di Mahkamah syariah dengan tujuan untuk menjadi seorang hakim agar bias menghapus pengaruh barat di bidang pendidikan dan hukum syari'ah.

Keprihatinan al-Nabhani terhadap penerapan hukum Islam semakin memacu keinginannya untuk berkarir di mahkamah Syari'ah. Atas dukungan dan bantuan teman al-Nabhani dapat diterima di pengadilan di Baisan. Karir al-Nabhani terus menanjak seiring dengan keuletannya kemampuannya sampai beliau diangkat sebagai kepala panitera Mahkamah Syariah di Haifa. Dan tahun 1940-1945 jabatan asisten hakimpun disandang, sampai kepindahan beliau ke Ramallah untuk menjadi hakim di mahkamah Ramallah sampai tahun 1948. Dan sejak tahun itu pula setelah Palestina jatuh di tangan Yahudi, maka beliau pindah ke Siria. Setelah tidak aktif sebagai hakim, al-Nabhani mendatangi Amman pada tahun 1951 dan sampai tahun 1953 al-Nabhani sering memberikan ceramah kepada para pelajar di jenjang menengah pada fakultas keislaman.

Peran al-Nabhani semakin mendapat perhatian pada saat beliau mendirikan partai politik yang bernama Hizb al-Tahrir al-Islami pada tahun 1953. Hal tersebut tidaklah mengejutkan karena selama remaja al-Nabhani telah diajak oleh kakeknya yang selalu bersentuhan dengan politik untuk bertemu dengan berbagai tokoh pembaharu Islam seperti Muhammad abduh dan tokoh lain yang anti barat dan mempunyai semangat untuk kebangkitan khilafat uthmaniyah. Hal tersebut juga di dukung dengan aktifitas dialog dan diskusi semasa kuliah di Dar al-Ulum di al-Azhar. Ketertarikan al-Nabhani dalam bidang politik terus berlangsung dari bangku sekolah sampai dunia kerja. Kritik



yang selalu disampaikan kepada kelompok Islam dan partai-partai politik nasionalis pada saat itu membuktikan ketertarikannya di dunia politik.

Melalui mimbar khutbah, al-Nabhani juga mensosialisasikan pandangan-pandangan politiknya. Pandangan yang kritis terhadap dominasi barat menjadi point penting dalam setiap khutbah yang disampaikan. Terutama berkaitan dengan konspirasi negara-negara Barat untuk menghancurkan Islam. Pidato yang kritis tersebut selain mendapat dukungan juga mendapat kecaman. Salah satunya berasal dari Raja Abdullah bin al-Husain yang meminta pertanggungjawaban atas khutbah yang disampaikan di Arab karena telah dianggap menghujat perundang-undangan negara-negara Arab. Keberanian untuk memberikan jawaban yang kritis dan tegas justru membuat Raja Abdullah marah dan mengusir serta mendeportasi al-Nabhani ke negeri asal. Pengusiran oleh Raja Abdullah inilah yang mengakibatkan al-Nabhani semakin total di dalam dunia politik melalui partai bentukannya Hizb al Tahrir (HT) mulai tahun 1953 – 1977.

Dalam kajiannya tentang ideologi dan praksis gerakan sosial fundamentalis, Syamsul Arifin memberikan gambaran bahwa, mengungkap sejarah HT yang berubah menjadi HTI ke Indonesia bukan hal yang gampang, mengingat dokumen yang lengkap dan keakuratan untuk menjelaskan kehadiran HT di Indonesia sangat terbatas. Untuk itu dalam menjelaskan perkembangan HTI di Indonesia dapat diperoleh berdasarkan informasi dari website yang dikeluarkan oleh HTI melalui [www.hizbut-tahrir.or.id](http://www.hizbut-tahrir.or.id). Dalam situs tersebut diperoleh informasi sederhana dan tidak rumit tentang perkembangan HTI. Hizbut Tahrir berdiri pada tahun 1953 di Al-Quds (Baitul Maqdis), Palestina. Gerakan ini lebih menitik beratkan pada perjuangan kebangkitan umat di seluruh dunia untuk mengembalikan kehidupan Islam melalui tegaknya kembali Khilafah Islamiyah ini dipelopori oleh Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani, seorang ulama alumni Al-Azhar Mesir, dan pernah menjadi hakim di Mahkamah Syariah di Palestina. Hizbut Tahrir pada saat ini telah berkembang ke seluruh negara Arab di Timur Tengah, termasuk di Afrika seperti Mesir, Libya, Sudan dan Aljazair. HT juga berkembang ke Turki, Inggris, Perancis, Jerman, Austria, Belanda, dan negara-negara Eropah lainnya hingga ke Amerika Serikat, Rusia, Uzbekistan, Tajikistan, Kirgistan, Pakistan, Malaysia, Indonesia, dan Australia.

Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia pada tahun 1980-an ini berarti ada rentang waktu yang lumayan lama untuk berkembang di Indonesia, sekitar 27 tahun. Apabila dibandingkan dengan negara lain, maka perkembangan HT di Indonesia dapat dikatakan terlambat<sup>14</sup>. Kehadiran HT di Indonesia tidak terlepas dari kehadiran Mama Abdullah Nuh pengelola pesantren Al-Ghazali di Bogor yang juga dosen Fakultas Sastra di Universitas Indonesia. Peran pertama mengenalkan HT ke

<sup>14</sup>,Syamsul Arifin, *Ideologi dan praksis gerakan social*, Malang, UMM Press, 2005.hal.121.

Indonesia dengan menghadirkan Abdurrahman Al-Baghdadi seorang aktivis HT di Australia untuk datang ke Bogor dalam rangka membantu pesantrennya.

Al-Baghdadi inilah yang mengawali untuk mengenalkan gagasan HT melalui interaksinya dengan kaum terdidik di lingkungan kampus IPB. Walaupun pada akhirnya al-Baghdadi di kabarkan saat ini tidak aktif di HT untuk sementara waktu dengan tanpa batasan waktu yang jelas. Dalam perkembangan selanjutnya, HT dikembangkan oleh Mama Abdullah Nuh dan setelah beliau wafat dilanjutkan kepemimpinannya oleh Muhammad Al-khathath dengan juru bicara Ismail Yusanto. Pola yang digunakan HT untuk mengembangkan ideologinya adalah melalui strategi dakwah. Dengan merintis dakwah di kampus-kampus besar di seluruh Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh Syamsul Arifin dalam bukunya tentang perkembangan HT di Malang, bahwa persemaian kegiatan HT yang ada di kampus seperti yang ada di Malang berawal dari kegiatan silaturahmi Badan Dakwah masjid (BDM) al-hikmah IKIP Malang ke Lembaga Dakwah Kampus (LDK) ITB, Unpad dan IPB. Artinya bahwa melalui media BDM dan LDK inilah ide dari HT dibangun dan dikembangkan. Bahkan aktivis BDM Malang yang bersilaturahmi tersebut bertemu dengan Didin Hafiduddin, Fathul Hidayat, Adian Husaini dan Ismail Yusanto, dan tiga orang terakhir inilah yang diindikasikan sebagai kelompok pertama yang mengembangkan ide-ide HT di Indonesia<sup>15</sup>. Dari pertemuan tersebut memunculkan format "daurah dirasah islamiyah" (DDI) sebagai strategi untuk mengembangkan ide HT melalui kampus-kampus. DDI inilah yang digunakan sebagai media untuk mengembangkan oleh para penggiat HT melalui pembahasan buku "*al-fikr al-Islam*" atau bunga rampai pemikiran islam yang ditulis oleh Muhammad Ismail<sup>16</sup>. Pola tersebut dapat dikatakan berhasil, sehingga pada era 1990-an ide-ide dakwah Hizbut Tahrir merambah ke masyarakat, melalui berbagai aktivitas dakwah di masjid, perkantoran, perusahaan, dan perumahan.

Hizbut Tahrir mendeklarasikan diri sebagai gerakan yang terbuka, namun seiring dengan sambutan masyarakat dilaksanakan konferensi Internasional soal Khilafah Islamiyah yang digelar pada tahun 2002 di Istora Senayan Jakarta. Kegiatan tersebut menghadirkan tokoh HT dari dalam dan luar negeri diantaranya KH. Dr. Muhammad usman, SPFK (Indonesia), ustad ismail Al-Mahwah (Australia), Ustadz Syarifudin M.zain (Malaysia), dan KH. Muhammad Al-Khathath (Indonesia). konferensi tersebut sebagai penanda lahirnya HT di Indonesia, dan mulai memproklamirkan diri sebagai organisasi politik yang berideologi Islam<sup>17</sup>.

Hizbut Tahrir menggunakan kaum terdidik untuk dapat memahami konsep ideologi yang mereka tawarkan. Dengan menggunakan dalil-dalil Al-qur'an dan hadist membangun argumentasi

<sup>15</sup>ibid, Syamsul Arifin, 123.

<sup>16</sup>Syamsul Arifin, Ideologi dan praksis gerakan social, Malang, UMM Press, 2005, hal. 124.

<sup>17</sup>As'ad Said Ali, Ideologi Gerakan Pasca Reformasi, Jakarta, LP3ES, 2013, hal. 80-81.

untuk memperkuat bangunan ideologi mereka yang mereka kembangkan melalui dakwah. Walaupun mempunyai jumlah yang sedikit dibandingkan dengan NU dan Muhammadiyah, namun ini dipandang sebagai hal yang menguntungkan bagi HTI untuk dapat melakukan konsolidasi secara intensif dengan para anggota dalam mengembangkan ide khilafah Islamiyah. Hizbut Tahrir mempunyai misi untuk berjuang bagi kesatuan dan persatuan kaum Muslimin di bawah bendera *Lailahillallah Muhammadur Rasulullah*<sup>18</sup>.

#### D. PEMBAHASAN

Untuk menjelaskan eksistensi Hizbut tahrir di Indonesia sebagai bentuk penguatan politik identitas yang berbasis pada agama, tidak dapat dilepaskan dari konsep dan pandangan bahwa HTI adalah sebuah partai politik yang dibangun oleh al-Nabhani atas dasar kegelisahannya terhadap pengaruh barat yang semakin dominan dalam dunia pendidikan dan hukum-hukum perundang – undangan yang berlaku di negerinya. Dengan ini, maka perlu dijelaskan dalam konteks HTI sebagai partai ideologis, dan HTI sebagai gerakan social. Kesua hal ini penting berkaitan dengan proses konstruksi identitas dengan melihat konteks ideologi dan sosial. Sehingga dapat menjelaskan tentang penguatan identitas Islam fundamentalis melalui peran HTI secara politik dan social.

##### **Dalam Konteks Politik: HTI sebagai Partai ideologis**

Hizbut Tahrir dalam konsep merupakan partai politik yang berideologi Islam. Dengan mendeklarasikan diri sebagai partai politik, maka politik merupakan kegiatannya, dan Islam adalah ideologinya. Hizbut Tahrir membangun gerakan berbasis pada kaum terdidik yang bergerak di tengah-tengah umat dan berupaya untuk menjadikan Islam sebagai ideologi gerakan serta membimbing serta mengarahkan pengikutnya untuk mendirikan kembali sistem Khilafah untuk sarana menegakkan hukum yang diturunkan Allah. Hizbut Tahrir merupakan organisasi politik, bukan organisasi kerohanian (seperti tarekat), bukan lembaga ilmiah (seperti lembaga studi agama atau badan penelitian), bukan lembaga pendidikan (akademis), dan bukan pula lembaga sosial (yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan). Ide-ide Islam menjadi jiwa, inti, dan sekaligus rahasia kelangsungan kelompoknya<sup>19</sup>.

Dasar yang digunakan argumentasi bagi Hizbut Tahrir untuk mendirikan “khilafah Islamiyah” adalah didirikan dalam rangka memenuhi seruan Allah Swt berdasarkan Qs. Ali Imran ayat 104: “(Dan) hendaklah ada di antara kalian segolongan umat (jamaah) yang menyeru kepada kebaikan (mengajak memilih kebaikan, yaitu memeluk Islam), memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung.”

<sup>18</sup> [www.Hizbut-tahrir.or.id](http://www.Hizbut-tahrir.or.id).

<sup>19</sup> [www.Hizbut-tahrir.or.id](http://www.Hizbut-tahrir.or.id).

Hizbut Tahrir mempunyai visi yang kuat untuk membangkitkan kembali umat Islam dengan argumentasi fenomena kemerosotan secara ekonomi yang terjadi didalam masyarakat, yang diakibatkan karena penggunaan ide-ide, sistem perundang-undangan, dan hukum-hukum yang berasal dari Barat dan oleh mereka disebut sebagai sistem "kufur" dan mempunyai misi untuk membebaskan masyarakat dari cengkramana negara-negara barat yang oleh mereka dinamakan sebagai negara "kafir. Hizbut Tahrir bermaksud untuk membangun Daulah Khilafah Islamiyah di muka bumi, sehingga hukum yang diturunkan Allah Swt dapat diberlakukan kembali.

Hizbut Tahrir mempunyai tujuan untuk mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia dengan mengajak kaum muslimin kembali hidup secara Islami dalam Darul Islam dan masyarakat Islam melalui pemberlakuan hukum syara'. Hizbut tahrir meletakkan pandangan hidup pada pemilahan secara tegas halal dan haram melalui pemberlakuan hukum Islam dalam daulah Khilafah yang dipimpin oleh seorang Khalifah. Dalam proses ini kholifah diangkat dan dibai'at oleh kaum muslimin untuk didengar dan ditaati agar menjalankan pemerintahan berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya, serta mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad.

Hizbut Tahrir melalui metode dakwah dengan menjaring kaum intelektual ingin membangkitkan kembali umat Islam pada kebangkitan yang benar, melalui pola pikir yang cemerlang dalam menyikapi kehidupan dengan membangun khilafah untuk memperoleh kejayaan. Negara Khilafah yang diangankan tersebut diharapkan menjadi negara nomor satu di dunia untuk memimpin dunia sesuai dengan hukum-hukum Islam. Melalui dakwah Hizbut Tahrir bertujuan untuk menyampaikan petunjuk syari'at bagi umat manusia untuk menentang kekufuran beserta segala ide dan peraturan kufur.

Pola kegiatan yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir adalah jalan dakwah. Melalui metode dakwah Islam Hizbut Tahrir berupaya untuk mengubah kondisi masyarakat yang dianggap telah rusak karena menganut ide-ide barat (kafir). Hal ini dilakukan dengan mengubah ide-ide rusak yang ada menjadi ide-ide Islam, sehingga ide-ide Islam tersebut menjadi opini umum di tengah masyarakat serta menjadi persepsi bagi mereka<sup>20</sup>. Selanjutnya persepsi ini akan mendorong mereka untuk merealisasikan dan menerapkannya sesuai dengan tuntutan Islam. Format kegiatan yang dilakukan Hizbut Tahrir lebih bersifat politik. Maksudnya adalah bahwa Hizbut Tahrir memperhatikan urusan-urusan masyarakat sesuai dengan hukum-hukum serta pemecahannya secara syar'i. Karena yang dimaksud politik adalah mengurus dan memelihara urusan-urusan masyarakat sesuai dengan hukum-hukum Islam dan pemecahan-pemecahannya<sup>21</sup>. Kegiatan yang bersifat politik muncul dalam setiap aktifitasnya dalam menyebarkan ide ke masyarakat sebagai upaya untuk

<sup>20</sup> www. Hizbut-tahrir.or.id.

<sup>21</sup> Ibid

mendidik dan membina umat untuk membebaskan aqidah yang menurut kelompok HT telah rusak dan menjauhkan dari pemikiran-pemikiran dari kaum kufur.

Kegiatan yang menggambarkan kekentalannya dalam konteks politik, ditunjukkan pada pertarungan pemikiran (*ash shiro'ul fikri*) dan perjuangan politiknya (*al kifahus siyasi*). Pertarungan pemikiran terlihat dalam penentangannya terhadap ide-ide dan aturan-aturan kufur. Hal itu tampak pula dalam penentangannya terhadap ide-ide yang salah, aqidah-aqidah yang rusak, atau persepsi-persepsi yang keliru, dengan cara menjelaskan kerusakannya, menampakkannya kekeliruannya, dan menjelaskan ketentuan hukum Islam dalam masalah tersebut. Perjuangan politik ini juga tampak jelas dalam kegiatannya menentang para penguasa, melancarkan kritik, kontrol, dan koreksi terhadap pemerintah tanpa menggunakan cara kekerasan. Hizbut Tahrir lebih mendasarkan strategi dengan cara mengemukakan ide Islam beserta hukum-hukumnya untuk dilaksanakan dalam kenyataan hidup dan pemerintahan. Untuk itu, dorongan keras untuk menjadikan Islam sebagai ideologi negara dan konstitusi sangat dominan dalam kegiatan politik HT. Argumentasi yang dibangun dalam hal ini adalah karena *Aqidah Islamiyah* adalah *aqidah aqliyah* (aqidah yang menjadi dasar pemikiran) dan *aqidah siyasiyah* (aqidah yang menjadi dasar politik) yang melahirkan aturan untuk memecahkan problematika manusia secara keseluruhan, baik di bidang politik, ekonomi, budaya, sosial, dan lain-lain<sup>22</sup>.

Mendasarkan pada sirah Rasulullah saw di Makkah hingga beliau berhasil mendirikan Daulah Islamiyah di Madinah, maka dakwah yang dijalankan oleh HT dilaksanakan melalui beberapa tahapan. **Pertama**, Tahapan Pembinaan dan Pengkaderan (*Marhalah At Tatsqif*), yang dilaksanakan untuk membentuk kader-kader yang mempercayai pemikiran dan metode Hizbut Tahrir, dalam rangka pembentukan kerangka tubuh partai. **Kedua**, Tahapan Berinteraksi dengan Umat (*Marhalah Tafa'ul Ma'a Al Ummah*), yang dilaksanakan agar umat turut memikul kewajiban dakwah Islam, hingga umat menjadikan Islam sebagai permasalahan utamanya, agar umat berjuang untuk mewujudkannya dalam realitas kehidupan. **Ketiga**, Tahapan Penerimaan Kekuasaan (*Marhalah Istilaam Al Hukm*), yang dilaksanakan untuk menerapkan Islam secara menyeluruh dan mengemban risalah Islam ke seluruh dunia.

Hizbut Tahrir menetapkan ide-ide sesuai dengan tujuan yang diperjuangkan, yaitu untuk membangun *khilafah islamiyah*. Ide-ide, tersebut telah dihimpun dalam berbagai buku, antara lain<sup>23</sup>:

1. *Nizhamul Islam* (Peraturan Hidup dalam Islam)
2. *Nizhamul Hukmi fil Islam* (Sistem Pemerintahan dalam Islam)
3. *Nizhamul Iqtishadi fil Islam* (Sistem Ekonomi dalam Islam)
4. *Nizhamul Ijtima'iy fil islam* (Sistem Pergaulan dalam islam)

<sup>22</sup> ibid

<sup>23</sup> www. Hizbut-tahrir.or.id.

5. *At-Takattul al-Hizbiy* (Pembentukan Partai Politik)
6. *Mafahim Hizbut Tahrir* (Pokok-pokok Pikiran Hizbut Tahrir)
7. *Daulatul Islamiyah* (Negara Islam)
8. *Al-Khilafah* (Sistem Khilafah)
9. *Syakhshiyah Islamiyah* – 3 jilid (Membentuk Kepribadian Islam)
10. *Mafahim Siyasiyah li Hizbit Tahrir* (Pokok-pokok Pikiran Politik Hizbut Tahrir)
11. *Nadharat Siyasiyah li Hizbit Tahrir* (beberapa Pandangan Politik Hizbut Tahrir)
12. *Kaifa Hudimatil Khilafah* (Persekongkolan Meruntuhkan Khilafah)
13. *Siyasatu al-Iqtishadiyah al-Mutsala* (Politik Ekonomi yang Agung)
14. *Al-Amwal fi Daulatil Khilafah* (Sistem Keuangan Negara Khilafah)
15. *Nizhamul 'Uqubat fil Islam* (Sistem Sanksi Peradilan dalam Islam)
16. *Ahkamul Bayyinat* (Hukum-hukum Pembuktian)
17. *Muqaddimatu ad-Dustur* (Pengantar Undang-undang Dasar Negara Islam)

Hizbut Tahrir menerima keanggotaan setiap orang Islam, baik laki-laki maupun wanita, dan berupaya mengikatnya dengan cara memeluk Aqidah Islamiyah, matang dalam Tsaqafah Hizbut Tahrir, serta mengambil dan menetapkan ide-ide dan pendapat-pendapat Hizbut Tahrir<sup>24</sup>. Keanggotaan akan terjadi apabila orang tersebut yang mengharuskan dirinya menjadi anggota Hizbut Tahrir, setelah sebelumnya ia melibatkan dirinya dengan (pembinaan dan aktivitas dakwah) Hizbut Tahrir; ketika dakwah telah berinteraksi dengannya dan ketika dia telah mengambil dan menetapkan ide-ide serta persepsi-persepsi Hizbut Tahrir. Melalui Aqidah Islamiyah dan Tsaqafah Hizbut Tahrir setiap anggota diikat. Strategi pengembangan lain yang dijalankan adalah dalam bentuk Halaqah-halaqah wanita dan laki-laki yang dilakukan secara terpisah.

Dengan gambaran diatas, HT sebagai partai politik yang ideologis merupakan bentuk institusi baru yang dibangun untuk memberikan alternative ideologi sebagai upaya memberikan solusi dalam permasalahan yang ada di masyarakat. Dalam hal ini *Legitimizing identity* sebagai pola dari konstruksi ide dan pemikiran al-Nabhani dilekatkan pada Hizb al Tahrir (HT). melalui partai inilah al-Nabhani mensosialisasikan gagasan yang kritis dan berhadapan dengan gagasan barat. Partai sebagai institusi baru yang dibangun untuk dapat memfasilitasi harapan dan keinginan al-Nabhani dalam membangun “khilafah Islamiyah”.

Langkah yang di ambil al-Nabhani merupakan bentuk *resistence identity*, sebagai bentuk penolakan atas ide barat dalam konteks peristiwa di negaranya Palestina. Sehingga membangun semangat yang kuat untuk memunculkan idealism baru berbasis agama dengan mendirikan partai

---

<sup>24</sup>[www.Hizbut-tahrir.or.id](http://www.Hizbut-tahrir.or.id).

politik ideologis. Untuk itu perkembangan HT yang dilakukan sampai ke luar negeri dengan misi untuk membangun khilafah islamiyah dengan cara menghilangkan sekat-sekat berbangsa dan bernegara dalam bentuk transnasional merupakan pola *project identity*. Sikap penolakan yang didukung dengan penerimaan yang positif oleh masyarakat terhadap ide al-Nabhani memberikan ruang bagi berkembangnya ide dan menguatnya ide tersebut dalam praktek kehidupan bernegara, khususnya dalam kancah politik. Bagaimanapun juga, sosialisasi secara masif tentang khilafah islamiyah merupakan bentuk eksistensi ide dalam pola *project identity* yang mengarah pada terbangunnya identitas baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan model khilafah islamiyah.

#### **Dalam Konteks Sosial : HTI Sebagai gerakan Sosial**

Munculnya HT tidak dapat lepas dari perubahan sosial yang terjadi di Turki dengan runtuhnya Turki Uthmani yang diakibatkan oleh lemahnya birokrasi, militer, ekonomi keuangan dan menguatnya kekuasaan baru di Eropa<sup>25</sup>. Serta fenomena yang terjadi di Palestina pada saat itu sebagai *back ground* dari terbangunnya pemikiran al-Nabhani. Semua penyebab keruntuhan tersebut menurut HT tidak lepas dari konspirasi dan pengaruh dominasi barat, pemberlakuan hukum-hukum barat dalam konteks masyarakat Islam dengan segala kelemahan dan ketimpangan yang terjadi diadalam masyarakat pada saat itu memunculkan semangat untuk menawarkan ideologi Islam sebagai alternatif menyelesaikan masalah. Ditengah arus perubahan dunia dalam sistem jahiliyah, maka menurut pandangan HTI harus diupayakan untuk melakukan transformasi sosial menuju masyarakat Islami guna membangun peradaban Islam<sup>26</sup>. Upaya transformasi ini dalam istilah Syekh Abdul Qadim Zallum dalam kitab Ta'rif disebut sebagai dakwah untuk melanjutkan kehidupan Islam karena kehidupan Islam yang pernah ada telah lenyap, tinggallah kehidupan umat Islam yang melaksanakan aturan Islam sebagian dan meninggalkan sebagian besar yang lain<sup>27</sup>. HTI membangun konsep pemahaman tersendiri terhadap nasionalisme dengan menyandingkan pada pandangan Islam secara transnasional. Nasionalisme yang dipahami justru sebagai penghalang bagi umat Islam dalam menjalankan ke-Islamannya secara kaffah.

Dalam konteks perubahan masyarakat di Indonesia, pengaruh krisis ekonomi pada awal tahun 1998 sebagai start point penjelas bagi menguatnya identitas keagamaan terutama gerakan HTI. Perubahan sosial masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, politik, hukum dan budaya memberikan kontribusi penting bagi penerimaan ide yang berbasis agama. Pandangan Bryan tentang peran agama dalam masyarakat sekiranya menjadi point penting untuk

<sup>25</sup> Syamsul Arifin, Ideologi dan praksis gerakan social, Malang, UMM Press, 2005, hal.136.

<sup>26</sup> Ismail Yusanto, islam ideology, Bangil, Alizza,1998, hal. 17.

<sup>27</sup> Ibid, Ismail Yusanto, hal.18.

mendudukan posisi agama sebagai ideologi. Dalam masyarakat yang sudah mulai mengerti dan memahami perubahan sosial dan politik (*literacy politic*), agama menjadi salah satu alternative untuk dijadikan sumber kajian. Melalui pesan yang tersurat dan tersirat dalam setiap ajaran yang disampaikan, agama mampu mempengaruhi dinamika dan perilaku setiap individu. Begitu juga dengan perkembangan ide HT yang ada di Indonesia. seperti yang disampaikan oleh Syamsul Arifin bahwa pada tahun 2002 an jumlah anggota HT se Indonesia 10.000<sup>28</sup>. Ini membuktikan bahwa ada penerimaan positif terhadap ide tersebut. Sehingga peran agama dianggap berhasil apabila mampu mempromosikan gagasan HT dengan baik kepada masyarakat umum, melalui lembaga dan sruktur yang dibangun, HT mampu melakukan pembinaan, halaqah, dan dirasah sebagai pola untuk pertukaran ide. Namun sisi lain justru HT akan menutup diri dengan ide lain, terutama yang berbasis pada pemikiran barat yang mereka pandang sebagai pemikiran kafir. Dalam hal ini HT belum mampu menerapkan peran agama dalam dua peran sekaligus sehingga mampu mempengaruhi publik.

Perubahan politik di Indonesia setelah reformasi memberikan ruang yang luas bagi tumbuhnya berbagai gerakan fundamentalisme. Kondisi yang berubah dari pola otoriter dengan ruang yang sempit bagi organisasi keagamaan untuk muncul memberikan dampak pada euphoria pada gerakan-gerakan dengan basis ideologi agama, dalam hal ini ideology Islam yang ditunjukkan dengan berkembangnya HTI pada awal tahun 1990-an. Munculnya HTI juga sebagai bentuk dari upaya untuk melepaskan tindakan represif yang dilakukan oleh pemerintahan orba. Disisi lain, munculnya HTI sebagai bentuk kegelisahan para intelektual Islam fundamentalisme atas fenomena krisis ekonomi dan politik pada awal tahun 1998. Kemunculan kaum fundamentalis Islam bertujuan untuk menawarkan konsep yang dipandang lebih sempurna dan mampu menyelesaikan permasalahan umat.

Fenomena HTI sebagai bukti bahwa telah muncul identitas yang berbasis pada primordialisme agama di Indonesia. Gerakan keagamaan muncul sebagai bentuk sentiment baru ikatan kemasyarakatan<sup>29</sup>. Walaupun dalam kenyataannya gerakan keagamaan ini memunculkan paradok dalam kehidupan masyarakat. Di satu pihak masyarakat banyak menaruh harapan terhadap agama sehingga agama sebagai satu-satunya pilihan diluar kapitalisme dan globalisme yang di pandang eksploitatif. Namun disisi lain masyarakat mulai cemas dengan menguatnya identitas yang berdasar agama dengan konflik yang dimunculkan.

Dalam kondisi masyarakat yang plural, bukan tidak mungkin upaya memaksakan ide dengan berbasis agama tertentu akan memunculkan konflik dalam masyarakat. Melalui strategi dengan menggunakan label "islam" justru akan membahayakan bangsa dan negara. Apalagi slogan Islam

<sup>28</sup> Ibid, Syamsul Arifin, hal. 122.

<sup>29</sup> Ahmad Suaedy dkk, Politisasi Agama dan Konflik Komunal, Jakarta, Wachid Institut, 2007, hal. 345.



yang dibawa bersifat “eksklusif” atau “puritan”. Dalam konteks ini HT harus mampu melakukan dialog secara jujur dan terbuka. Walaupun menurut Syafii Maarif dalam kenyataannya kaum fundamentalis sangat sulit untuk diajak berdialog secara terbuka dan jujur. Keinginan yang kuat untuk melaksanakan khilafah islamiyah dengan memandang bahwa ide-ide barat sebagai ide yang kufur, tanpa mempertimbangan asas kemanfaatannya. Daulah yang diyakini oleh HTI adalah sebuah kewajiban asasi dan sebagai keharusan yang menuntut pelaksanaan tanpa tawar menawar dan tanpa kompromi<sup>30</sup>. Dapat dikatakan bahwa keinginan HTI tersebut “semau gue”, yang justru akan menjadi penghalang dalam upaya melakukan dialog atas nama persamaan kedudukan secara ide dan posisi.

Tindakan “semau gue” juga dapat dilihat dari pandangan HTI yang gampang untuk menyematkan “label kafir” pada setiap orang yang dianggapnya tidak menjalankan syari’at Islam. Tidak pernah ada area “abu-abu” untuk dapat dilakukan dialog. Sehingga apapun pemikiran yang dibawa oleh HTI akan selalu mencari membenaran sendiri dengan dalil-dalil al-qur’an dan as-sunnah tanpa mempertimbangkan sisi ide dari orang lain. Cara yang demikian sebagai bentuk eksistensi ke Islaman yang dipilih oleh HTI. Sehingga ide yang dibawa cenderung memaksakan kehendak dengan “jubbah islam” sebagai agama Allah, maka aturan Alloh harus dijalankan tanpa kompromi. Tidak ada pola pertukaran ide seperti yang diharapkan seperti pandangan Bryan, dimana agama mempunyai peran pertukaran ide. Yang ada adalah pertukaran kepentingan antara negara dengan aktor sosial dan politik lain yang dapat berlangsung secara formal dan institusional melalui proses tawar menawar dalam merumuskan kebijakan<sup>31</sup>. HTI selalu menegosiasikan syari’ah Islam untuk dapat diterapkan langsung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks inilah politik identitas dimainkan. Menggunakan dalil “agama Alloh” maka semua akan syah dilaksanakan dengan tanpa melakukan dialog dan kompromi.

Gerakan partai politik dengan nama HT akan merusak bangunan *nation state* bagi bangsa Indonesia. gagasan baru “khilafah islamiyah” yang dikembangkan melalui pola halaqah dan dakwah dengan konsep trans nasionalnya akan menjadi masalah, pada saat gagasan tersebut diaktualisasikan dibawah “khilafah islamiah” sebagai bentuk politik identitas yang dapat menghancurkan bangunan bermasyarakat. Konsep transnasional yang dikembangkan HT akan merusak bangunan nasionalisme yang ada di Indonesia. Dengan mendasarkan pada pluralism kebangsaan nasionalisme kebangsaan seharusnya tidak didasarkan pada kesadaran tentang kesatuan dalam konsep khilafah islamiyah melainkan harus didasarkan pada kesadaran akan perbedaan dalam semangat persatuan.

<sup>30</sup> Syamsul Arifin, *Ideologi dan praksis gerakan social*, Malang, UMM Press, 2005, hal. 143.

<sup>31</sup> Abdullahi Ahmed An-Na’im, *Islam dan Negara Sekuler: Menegosiasikan Masa Depan Syari’ah*, Jakarta, Mizan, 2007, hal.153.

Bagaimana dengan masa depan demokrasi di Indonesia? konsep egaliter, konsep pluralism yang diusung dalam demokrasi tidak akan dapat disandingkan dengan konsep “tanpa kompromi” yang dijalankan oleh HTI. Untuk itu sikap eksklusif yang ditunjukkan oleh HTI semakin lama akan merusak bangunan demokrasi, bahkan bangunan berbangsa dan bernegara. Dengan target khilafah Islamiyah pada tahun 2020, tidak menutup kemungkinan akan memunculkan gerakan yang anarkhis dengan tujuan memaksakan kehendak untuk membangun “khilafah islamiyah”. HTI telah membangun pola pikir baru untuk menggeser nasionalisme ke arah transnasional, hal ini sebagai bukti dan tanda munculnya identitas-identitas politik baru yang direpresentasikan melalui kesamaan agama (pandangan agama). HTI memandang bahwa nasionalisme mengunggulkan paham kebangsaan dan mensubordinasikan paham yang lain termasuk Islam<sup>32</sup>. Menurut HTI paham nasionalisme sesungguhnya kosong dan hanya rekaan belaka yang bersifat abstrak yang tidak pernah memberikan manfaat bagi yang mencintai. Bahkan nasionalisme dipandang sebagai sumber perpecahan umat Islam diseluruh dunia. Namun menurut An-Na'im, justifikasi sosiologis maupun politik apapun yang diajukan untuk menguatkan aspek-aspek syari'ah tersebut tidak lagi valid untuk konteks masyarakat Islam modern<sup>33</sup>.

Yang membedakan pola gerakan sosial HTI dengan ormas Islam fundamentalisme yang lain adalah, bahwa HTI jelas-jelas memposisikan diri diluar kerangka kebangsaan (*nation-state*) dan ingin membangun kerangka kebangsaan baru melalui pola transnasional dengan model khilafah Islamiyah. HTI tidak masuk pada sistem pemerintahan, organisasi ini hanya melakukan kritik diluar sistem. Tidak juga sebagai oposisi melainkan sebagai kelompok tandingan untuk membangun negara bangsa sendiri, hal yang buruk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dalam konteks demokrasi di Indonesia.

## E. KESIMPULAN

Pada bagian ini akan dipaparkan kesimpulan yang bertolak dari rumusan permasalahan. Dalam rumusan masalah telah dijelaskan bahwa tuisan ini akan menggambarkan proses penguatan identitas sebagai bentuk eksistensi pemikiran HTI dalam dinamika politik di Indonesia dalam konteks perkembangan demokrasi. Dari uraian penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa HTI sebagai gerakan fundamentalisme membangun identitas melalui strategi dakwah secara kontinu. HTI sebagai partai politik yang ideologis Islam merupakan bentuk institusi baru yang dibangun untuk memberikan alternative ideologi sebagai upaya memberikan solusi dalam permasalahan yang ada di masyarakat melalui khilafah islamiyah.

<sup>32</sup> Ismail Yusanto, *Islam Ideologi*, Bangil, Al-Izzah, 1998, hal. 7.

<sup>33</sup> Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Islam dan Negara Sekuler: Menegosiasikan Masa Depan Syari'ah*, Jakarta, Mizan, 2007, hal.173.

Dengan pola gerakan yang eksklusif konsep pluralism disandingkan dengan konsep "tanpa kompromi" akan dapat merusak bangunan demokrasi serta bangunan kebangsaan dan bernegara. Khilafah islamiyah yang ditargetkan pada tahun 2020, akan memunculkan gerakan yang anarkhis dengan tujuan untuk membangun "khilafah islamiyah". HTI telah membangun pola pikir baru ke arah transnasional sebagai bukti munculnya identitas-identitas politik baru yang direpresentasikan melalui kesamaan agama (pandangan agama), walaupun dalam konteks negara Islam modern hal tersebut tidak lagi menjadi hal yang valid.

#### Daftar Bacaan

- Ahmed An-Na'im, Abdullah, Islam dan Negara Sekuler: Mengegosiasikan Masa Depan Syaria'h, Jakarta, Mizan, 2007.
- Ali, Fachry, *Islam Ideologi Dunia dan Dominasi Struktural*, Jakarta, Mizan, 1984.
- Alfadal, Irawati dkk, *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, Jakarta, LPI Press, 2005.
- Artin, Syamsul, *Ideologi dan Praksis Gerakan Sosial Fundamentalis: Pengalaman Fundamentalis di Indonesia*, Malang, UMM Press, 2005.
- Castel, Manuel, *The Power of Identity*, Cambridge, Black Well Publishing, 2004.
- Calhoun, Craig, *Social Theory and Politics of Identity*, Cambridge, Black Well Publishing, 1994.
- Eugene Smith, Donald, *Agama dan Perkembangan Politik*, Surabaya, Sinar Jaya, 1998.
- Ismail, Muhammad, *Bunga Rampai Pemikiran Islam*, Depok, Gemma Insani, 2013.
- Kuntowijoyo, *Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi*, Bandung, Mizan, 1994.
- Kenny, Michael, *The Politics of Identity*, Cambridge, Polity Press, 2004.
- Marijan, Kacung, *Ilmu Politik, dalam Paradigma Abad 21*, Jakarta, Prenada Media Group, 2013.
- Nata, Abuddin, *Problematika Politik Islam di Indonesia*, Jakarta, Grasindo, 2002.
- Rahmat, Imadudin, *Arus Baru Islam Radikal*, Jakarta, Erlangga, 2002.
- Syaifi, Maarif dan Martin Lukito Sinaga dkk, *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*, Jakarta, Yayasan abad demokrasi, 2012.
- Suaedy, Ahmad, *Politikasi Agama dan Konflik Komunal*, Jakarta, The Wachid Institute, 2007.
- Said Ali, As'ad, *Ideologi Gerakan Pasca Reformasi*, Jakarta, LP3ES, 2013.
- Tibi, bassam, *Ancaman Fundamentalisme*, Jogyakarta, tara wacana, 2000.
- Yusanto, Ismail, *Islam ideologi*, Bangil Jatim, Al-Izza, 1998.
- Yusuf, Musa, *Politik dan Negara dalam Islam*, Surabaya, Al-Ikhlis, 1990.

, [www.hizbut-tahrir.or.id](http://www.hizbut-tahrir.or.id)